

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi dunia juga memupuk kancangnya perkembangan teknologi yang mana menyebabkan persaingan ketat di antara lembaga keuangan perbankan pada umumnya. Hal tersebut dapat terlihat dari pola atau strategi pemasaran produk dalam pengenalan dan pemaparan wacana produk beserta keunggulan lembaga keuangan tersebut kepada masyarakat demi tercapainya tujuan lembaga keuangan tersebut. Pergerakan ke arah positif atau negatif pada perusahaan haruslah mendapatkan pengawasan utama bagi pimpinan perusahaan, Seperti halnya PT. BPR LPN Sungai Rumbai yang merupakan lembaga keuangan yang keberadaannya dapat diperhitungkan dalam usaha bisnis.

PT. BPR LPN Sungai rumbai merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam bentuk usaha Bank yang berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun terbukti dengan meningkatnya Aset, Nasabah, Dana Tabungan, Deposito serta Kredit. Peningkatan kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Sistem yang sedang berjalan pun dalam Pengambilan keputusan penentuan kelayakan pemberian kredit di PT. BPR LPN Sungai Rumbai masih menggunakan proses manual dan database yang digunakan masih dalam bentuk kertas berupa berkas-berkas, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengolahan data nasabah. Hal ini berdampak terhadap lamanya nasabah dalam menunggu hasil keputusan dari pihak Bank.

Oleh karena itu, Penggunaan teknologi sistem komputer dalam melakukan analisis kelayakan pemberian kredit dipandang perlu untuk membantu pihak manajemen dalam menentukan keputusan layak tidak seorang calon nasabah untuk mendapatkan kredit dengan membuat sebuah sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode MFEP (Multifactor Evaluation Process). Dan untuk menciptakan suatu sistem informasi yang membantu memperlancar jalannya penentuan kelayakan pemberian kredit pada PT.BPR LPN Sungai Rumbai, penulis mengusulkan suatu sistem yang terkomputerisasi untuk lebih menyempurnakan sistem yang lama, sehingga informasi yang dihasilkan dapat disajikan secara cepat, tepat dan efisien dengan judul **“PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR LPN SUNGAI RUMBAI MENERAPKAN METODE MFEP (MULTIFACTOR EVALUATION PROCESS) DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN VISUAL BASIC 2017 DAN DATABASE MYSQL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah yang dihadapi, yaitu:

1. Bagaimana PT. BPR LPN Sungai Rumbai dapat menentukan kelayakan pemberian kredit dengan sistem pendukung keputusan secara tepat sasaran?

2. Bagaimana membangun sistem informasi pendukung keputusan ini dapat menyimpan data yang terintegrasi sehingga data dapat dicari dengan cepat ?
3. Bagaimana membuat sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit dengan menggunakan sebuah program yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan sehingga lebih mudah, efisien dan akurat?
4. Bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan terintegrasi dengan database?
5. Bagaimana melakukan pengujian terhadap sistem informasi pendukung keputusan agar terhindar dari kesalahan dan sesuai dengan kebutuhan?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan masalah diatas, maka dapat diambil hipotesa sebagai berikut adalah:

1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan, diharapkan penentuan kelayakan pemberian kredit dapat dilakukan secara tepat.
2. Dengan penyusunan sistem diharapkan dapat menyimpan data yang terintegrasi sehingga data dapat dicari dengan cepat.
3. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2017, diharapkan para user dapat menggunakan sistem penentuan kelayakan pemberian kredit lebih mudah, efisien dan akurat.
4. Dengan adanya sistem pengolahan data yang baru dengan memanfaatkan teknologi komputer diharapkan PT. BPR PLN dapat

mengimplementasikan sistem informasi pendukung keputusan terintegrasi dengan database.

5. Dengan adanya pengujian terhadap sistem informasi pendukung keputusan diharapkan agar terhindar dari kesalahan dan sesuai dengan kebutuhan.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dan langkah-langkah pemecahan masalah tidak keluar dari topik pembahasan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini menitik beratkan pada pengolahan data kelayakan pemberian kredit berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan telah ditentukan oleh PT.BPR LPN Sungai Rumbai kepada nasabah-nasabah yang akan melakukan pengambilan kredit. Sehingga dengan menggunakan sistem baru ini nantinya dapat meningkatkan efektifitas kerja dan mempermudah pekerjaan pengambilan keputusan pada bagian analisa kredit yang ada pada PT. BPR LPN Sungai Rumbai.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari Penulisan ini penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk membangun sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan pemberian kredit pada PT.BPR LPN Sungai Rumbai.
2. Untuk menerapkan metode MFEP (*Multifactor Evaluation Process*) data penentuan kelayakan pemberian kredit pada PT.BPR LPN Sungai Rumbai.

3. Untuk menghasilkan sebuah sistem yang bisa dijadikan alat bantu dan mempermudah dalam penentuan kelayakan pemberian kredit.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat akademis dari hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

memberikan kemudahan pada PT.BPR LPN Sungai Rumbai dalam proses penentuan kelayakan pemberian kredit sesuai kriteria yang telah ditentukan.

2. Bagi Pengembangan Ilmu

Memperluas pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang teknologi pemrograman.

3. Bagi Penulis

Sebagai bentuk pengaplikasian dari proses belajar selama ini dan guna menambah pengetahuan dan pengalaman tentang sistem informasi di dalam suatu perusahaan.

4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai masukan untuk studi kepustakaan bagi yang akan melakukan penelitian yang sama dengan bidang yang dibahas dalam penelitian ini.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan

PT. BPR-LPN Sungai Rumbai yang tumbuh dan berkembang di nagari Sungai Rumbai, pada awal berdirinya adalah sebuah lembaga keuangan yang

aktivitasnya hanya terbatas untuk anggotanya dimana lembaga ini disebut dengan Lumbang Pitih Nagari (LPN), sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 326/GSB/1978 Tanggal 1 Maret 1978 dan sebagai dasar hukumnya ditetapkan dengan peraturan Daerah Sumatera Barat No. 1 Tahun 1982 Tentang Lumbang Pitih Nagari. Dan untuk pertama kalinya berdiri beranggotakan sebanyak 40 orang dengan uang pangkal Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Pendirian LPN diperkuat dengan izin Bupati Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan Surat Keputusan Nomor 10 Tanggal 08 Agustus 1988.

Sesuai dengan perkembangannya yang semakin meningkat di Tahun 1990 status LPN ditingkatkan menjadi BPR gaya lama dengan nama BPR-LPN Sungai Rumbai, sesuai dengan Akta Notaris H. Ismail Omari Tanggal 4 september 1990 No.39/1990 Tentang Anggaran Dasar BPR-LPNs Sungai Rumbai serta diperkuat dengan izin operasional dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. Kep. 486/KM.13.1990 Tanggal 25 Oktober 1990.

1.7.1 Sejarah Tentang PT.BPR LPN Sungai Rumbai

Dari tahun ketahun PT. BPR-LPN Sungai Rumbai mengalami pertumbuhan yang cukup pesat terbukti dengan meningkatnya Asset, Nasabah, Dana baik Tabungan maupun Deposito serta Kredit yg diberikan, hingga tahun 1996 bentuk Badan Usaha meningkat menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris H. Deetje Farida Djanas, SH No. 19 Tanggal 16 September 1996 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-12191-HT.01.01 Tahun 1997 Tanggal 24 November 1997. Dengan berubahnya status BPR menjadi Perseroan

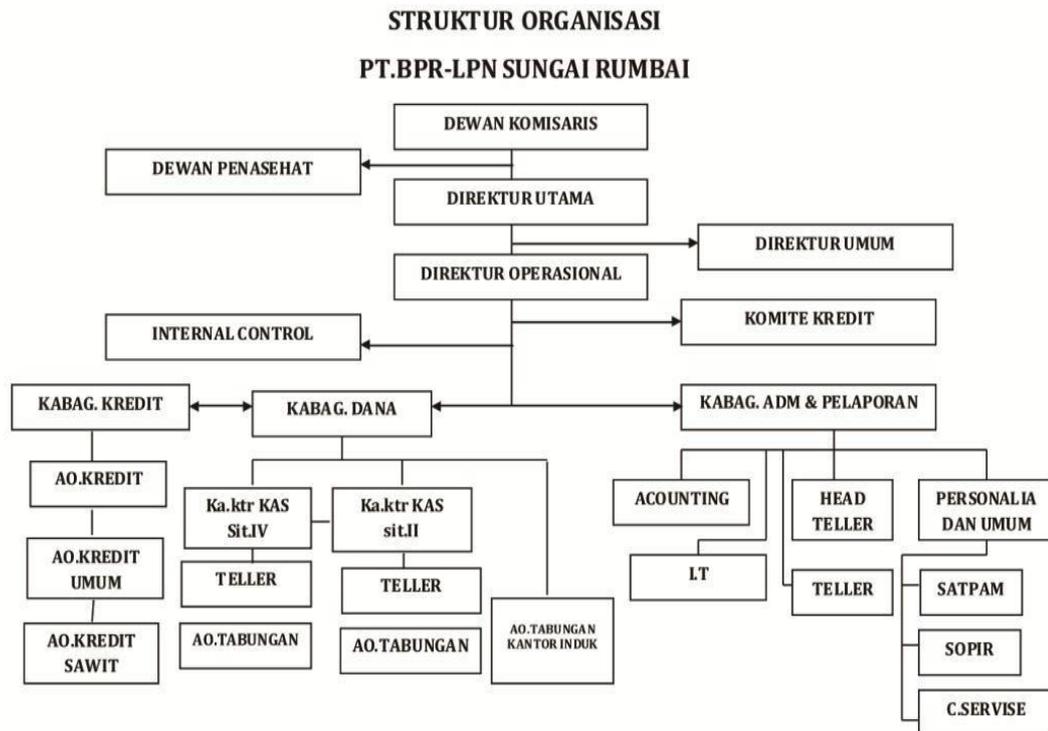
Terbatas (PT), maka terjadi juga perubahan dalam pelayanan dimana sebelumnya hanya melayani anggotanya saja, sekarang telah berkembang sehingga dapat melayani seluruh lapisan masyarakat.

Dari Tahun 1997 sampai sekarang sudah berkali-kali mengalami perubahan Akta, terakhir berdasarkan Akta Keputusan Rapat RUDS no 11 Tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh notaris Syamsuhardi, SH dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan no: AHU-61189 Alt 01.02 tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009.

1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi secara umum merupakan kerangka antar hubungan satu organisasi yang di dalamnya terdapat tugas serta wewenang, masing-masing memiliki peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Dalam organisasi tersebut akan diketahui dengan jelas pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi PT. BPR LPN Sungai Rumbai Dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :



Sumber : PT. BPR LPN Sungai Rumbai

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.7.3 Tugas Masing-masing Bagian

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 1.1 maka tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian terdapat pada PT. BPR LPN Sungai Rumbai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Direktur Utama:
 - a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
 - b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
 - c. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan.

- d. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan.
 - e. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan.
2. Internal Control
- Mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan aman.
3. Kabag Dana
- a. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
 - b. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.
 - c. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
4. Teller
- a. Melakukan pengarahan langsung, memonitor secara aktif dan mengkoordinasi seluruh jalannya transaksi yang ditangani teller, misalnya setoran, penarikan, pemindahbukuan, dan lain-lain.
 - b. Memberi solusi jika terjadi masalah di counter dan apabila teller selisih melakukan balancing akhir hari.

5. Personalia & Umum
 - a. Membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan.
 - b. Menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja.
 - c. Mengurus seleksi tenaga kerja.
 - d. Mengurus dan mengembangkan proses pendidikan karyawan.
 - e. soal-soal pemberhentian (pension)
6. Satpam
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang dalam hal keamanan.
 - b. Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor.
 - c. Mengawal penyetoran dan pengambilan uang dari Kantor Cabang ke Kantor Cabang Pembantu.
 - d. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional. Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang dalam hal keamanan.
7. Sopir
 - a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor.
 - b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
8. Cleaning Service
 - a. Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.
 - b. Membantu penyimpanan arsip dan dokumen nasabah.

- c. Sewaktu-waktu bila dibutuhkan, melakukan kegiatan pengiriman (kurir) dokumen ke Kantor Cabang Pembantu atau Kantor lainnya.